#### RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT

1. NamaDiklat : Pelatihan Dasar Kader CPNS Golongan III Angkatan 34 Badan Pusat Statistik Tahun 2019

2. Mata Diklat : Etika Publik

3. Alokasi Waktu : 12 JP

4. Deskripsi Singkat : Mata Diklat Etika Publik memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta Diklat melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, aktualisasi kode etik PNS. Mata Diklat ini disajikan berbasis *experiencial learning*, dengan penekanan pada

proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut, melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studi lapangan dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari

kemampuannya mengaktualisasikan nilai-nilai dasar etika dalam mengelola pelaksanaan tugas jabatannya.

5. Tujuan Pembelajaran

a. Hasil Belajar : Kompetensi dasar yang ingin dicapai melalui modul ini adalah: Setelah mengikuti pembelajaran ini,

peserta diharapkan mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada

standar etika publik yang tinggi.

Untuk menilai ketercapaian kompetensi dasar tersebut dapat diukur melalui indikator keberhasilan yang

dirumuskan sebagai berikut:

b. Indikator Hasil Belajar :

1. Memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik;

2. Mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku dan implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya; dan

3. Menunjukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku selama Diklat.

	INDIKATOR HASIL		MATERI POKOK		ALAT	ESTIMASI WAKTU		KTU		
NO	BELAJAR	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	BANTU& MEDIA	т	L	Lap	Total	REFERENSI
1	Memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik	Kode etik dan perilaku pejabat publik	<ul> <li>1.1 Pengertian Etika</li> <li>2.1 Pengertian Kode Etik</li> <li>3.1 Kode Etik Aparatur Sipil Negara</li> <li>4.1 Nilai-nilai Dasar Etika Publik</li> <li>5.1 Definisi dan Lingkup Etika Publik</li> <li>6.1 Dimensi Etika Publik</li> <li>7.1 Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi</li> <li>8.1 Perilaku Pejabat Publik</li> </ul>	<ol> <li>Mengamati berdasarkan pengalaman;</li> <li>Diskusi;</li> <li>Studi kasus;</li> <li>Ekspositori (paparan instruktur);</li> <li>Simulasi;</li> <li>Menalar;</li> <li>Mengkomuni-kasikan;</li> <li>Studi lapangan.</li> </ol>	Bahan tayang, Laporan kunjungan.				3 JP (135 menit)	Kegiatan Belajar 1 Modul Etika Publik
2	Mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku dan implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya	Bentuk- Bentuk Kode Etik dan Implikasinya	2.1 Pentingnya Etika Dalam Urusan Publik 2.2 Penggunaan Kekuasaan: Legitimasi Kebijakan 2.3 Konflik Kepentingan 2.4 Sumber-sumber Kode Etik bagi Aparatur Sipil Negara	<ol> <li>Mengamati berdasarkan pengalaman;</li> <li>Diskusi;</li> <li>Studi kasus;</li> <li>Ekspositori (paparan instruktur);</li> <li>Simulasi;</li> <li>Menalar;</li> <li>Menyimak tayangan film;</li> <li>Menyimpulkan;</li> <li>Mengkomuni-kasikan;</li> <li>Studi lapangan.</li> </ol>	Bahan tayang, Film pendek, Laporan kunjungan.				6 JP (270 menit)	Kegiatan Belajar 1 Modul Etika Publik

3	Menunjukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku	Aktualisasi Etika Aparatur Sipil Negara	<ul> <li>3.1 Pemanfaatan Sumberdaya Publik</li> <li>3.2 Absen Sidik Jari</li> <li>3.3 Penerimaan Tenaga Honorer</li> <li>3.4 Pemberian Hadiah atau Cindera Mata</li> <li>3.5 Konflik Kepentingan dalam Pengadaan</li> <li>3.6 Pelantikan Walikota di Penjara</li> <li>3.7 Terpidana Korupsi Menjabat Kembali</li> <li>3.8 Whistle Blower atau Membocorkan Informasi</li> <li>3.9 Pengunduran Diri Pejabat</li> <li>3.10 Melanggar Hukum</li> <li>3.11 Perbuatan Tercela</li> <li>3.12 Kebocoran Ujian Nasional</li> <li>3.13 Baharuddin Lopa, Penegak Hukum yang Jujur</li> </ul>	<ol> <li>Mengamati berdasarkan pengalaman;</li> <li>Diskusi;</li> <li>Studi kasus;</li> <li>Ekspositori (paparan instruktur);</li> <li>Simulasi;</li> <li>Menalar;</li> <li>Demonsttrasi;</li> <li>Menyimak tayangan film;</li> <li>Menyimpulkan;</li> <li>Mengkomuni-kasikan;</li> <li>Studi lapangan.</li> </ol>	Bahan tayang, Film pendek, Laporan kunjungan.		3 JP (135 menit)	Kegiatan Belajar 1 Modul Etika Publik
	Jumlah						12 JP	

#### RENCANA PEMBELAJARAN

1. NamaDiklat Pelatihan Dasar Kader CPNS Golongan III Angkatan 34 Badan Pusat Statistik Tahun 2019

2. Mata Diklat Etika Publik

3. Alokasi Waktu : 12 JP

5. Deskripsi Singkat : Mata Diklat Etika Publik memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta Diklat

> melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, aktualisasi kode etik PNS. Mata Diklat ini disajikan berbasis experiencial learning, dengan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut, melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studi lapangan dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan nilai-nilai dasar etika dalam mengelola pelaksanaan tugas jabatannya.

### 6. Tujuan Pembelajaran

a. Hasil Belajar Kompetensi dasar yang ingin dicapai melalui modul ini adalah: Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi.

Untuk menilai ketercapaian kompetensi dasar tersebut dapat diukur melalui indikator keberhasilan yang

dirumuskan sebagai berikut:

#### b. Indikator Hasil Belajar:

- 1. Memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik;
- 2. Mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku dan implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya; dan
- 3. Menunjukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku selama Diklat.
- 4. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok:

	a. Materi Pokok:		<b>b.</b> Sub materi pokok:
1.	Kode etik dan perilaku pejabat publik	1.1	Pengertian Etika
		1.2	Pengertian Kode Etik
		1.3	Kode Etik Aparatur Sipil Negara
		1.4	Nilai-nilai Dasar Etika Publik
		1.5	Definisi dan Lingkup Etika Publik
		1.6	Dimensi Etika Publik
		1.7	Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi
		1.8	Perilaku Pejabat Publik
2.	Bentuk-Bentuk Kode Etik dan Implikasinya	2.1	Pentingnya Etika Dalam Urusan Publik
		2.2	Penggunaan Kekuasaan: Legitimasi Kebijakan
		2.3	Konflik Kepentingan
		2.4	Sumber-sumber Kode Etik bagi Aparatur Sipil Negara
3.	Aktualisasi Etika Aparatur Sipil Negara	3.1.	Pemanfaatan Sumberdaya Publik
-	riktaansast 2tika riparatai sipii ritegara	3.2.	Absen Sidik Jari
		3.3.	Penerimaan Tenaga Honorer
		3.4.	Pemberian Hadiah atau Cindera Mata
		3.5.	Konflik Kepentingan dalam Pengadaan
		3.6.	Pelantikan Walikota di Penjara
		3.7.	Terpidana Korupsi Menjabat Kembali
		3.8.	Whistle Blower atau Membocorkan Informasi
		3.9.	Pengunduran Diri Pejabat
		3.10.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		3.11.	
		3.12.	Kebocoran Ujian Nasional
		3.13.	Baharuddin Lopa, Penegak Hukum yang Jujur

# 5. Kegiatan Belajar Mengajar :

NO.	TAHAPAN	KEGIATAI	N	Metode	Media&Alat	Alokasi
NO.	KEGIATAN	FASILITATOR	PESERTA	Metode	Bantu	Waktu
1.	Pendahuluan	<ol> <li>Memperkenalkan diri dan menyapa peserta;</li> <li>Memaparkan tujuan dan capaian hasil pembelajaran;</li> <li>Memberikan pertanyaan terkait tugas dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara (PNS).</li> </ol>	<ol> <li>Menyimak paparan fasilitator;</li> <li>Mencatat hal-hal yang dianggap penting dari paparan fasilitator;</li> <li>Merespons pertanyaan.</li> </ol>	<ol> <li>Ekspositori,</li> <li>Tanya jawab.</li> </ol>		15 menit
2.	Penyajian	<ol> <li>Memberi kesempatan kepada peserta untuk merenungkan harapan mereka terkait fungsinya sebagai PNS;</li> <li>Menugaskan peserta untuk mengamati peristiwa yang pernah dialaminya terkait etika publik PNS di berbagai instansi di daerahnya;</li> <li>Menugaskan peserta untuk menuangkan pemahaman tentang Etika Publik;</li> <li>Memaparkan materi modul sesuai bahan tayang yang sudah disiapkan;</li> <li>Menayangkan film pendek; kendaraan yang melewati jalur busway</li> <li>Menugaskan peserta untuk menganalisis saling keterkaitan antara berbagai aspek yang mempengaruhi etika publik; kasus ambulance di</li> </ol>	<ol> <li>Melakukan pengamatan berdasarkan pengalaman;</li> <li>Diskusi;</li> <li>Studi kasus;</li> <li>Ekspositori (paparan instruktur);</li> <li>Menyimak tayangan film;</li> <li>Simulasi;</li> <li>Menyimpulkan;</li> <li>Studi lapangan.</li> </ol>	<ol> <li>Mengamati berdasarkan pengalaman;</li> <li>Diskusi;</li> <li>Studi kasus;</li> <li>Ekspositori (paparan instruktur);</li> <li>Simulasi;</li> <li>Menalar;</li> <li>Menyimak tayangan film;</li> <li>Menyimpulkan;</li> <li>Mengkomunikasikan;</li> <li>Studi lapangan.</li> </ol>	Bahan Tayang, Film pendek, Laporan kunjungan	515 menit

		Jerman 7. Menugaskan peserta untuk menyimpulkan materi yang telah disajikan, film yang ditayangkan, dan hasil diskusi serta simulasi.			
3	Penutup	<ol> <li>Melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan;</li> <li>Mengevaluasi hasil kunjungan lapangan;</li> <li>Mengevaluasi daya serap peserta melalui tes tertulis.</li> </ol>	1. Melakukan refleksi dan evaluasi atas kegiatan Diklat yang telah berlangsung di kelas maupun ketika kunjungan lapangan;  2. Mengikuti tes tulis.	Soal tes tulis dalam bentuk esey, atau bentuk lain sesuai kebutuhan.	10 menit

### 6. Evaluasi Pembelajaran:

NO		MATERI & SUB MATERI POKOK		BENTUK EVALUASI
1	Kode etik	dan perilaku pejabat publik.	1.	Pertanyaan lisan
	1.1	Pengertian Etika	2.	Partisipasi aktif dalam diskusi selama pembelajaran berlangsung
	1.2	Pengertian Kode Etik	3.	Presentasi hasil kunjungan
	1.3	Kode Etik Aparatur Sipil Negara	4.	Laporan hasil kunjungan
	1.4	Nilai-nilai Dasar Etika Publik		
	1.5	Definisi dan Lingkup Etika Publik		
	1.6	Dimensi Etika Publik		
	1.7	Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi		
	1.8	Perilaku Pejabat Publik		
2	Bentuk-Be	entuk Kode Etik dan ImplikasinyaManajemen Mutu		
	2.1	Pentingnya Etika Dalam Urusan Publik		

	2.2	Penggunaan Kekuasaan: Legitimasi Kebijakan
	2.3	Konflik Kepentingan
	2.4	Sumber-sumber Kode Etik bagi Aparatur Sipil Negara
3	Aktualisasi	Etika Aparatur Sipil Negara .
	3.1.	Pemanfaatan Sumberdaya Publik
	3.2.	Absen Sidik Jari
	3.3.	Penerimaan Tenaga Honorer
	3.4.	Pemberian Hadiah atau Cindera Mata
	3.5.	Konflik Kepentingan dalam Pengadaan
	3.6.	Pelantikan Walikota di Penjara
	3.7.	Terpidana Korupsi Menjabat Kembali
	3.8.	Whistle Blower atau Membocorkan Informasi
	3.9.	Pengunduran Diri Pejabat
	3.10.	Melanggar Hukum
	3.11.	Perbuatan Tercela
	3.12.	Kebocoran Ujian Nasional
	3.13.	Baharuddin Lopa, Penegak Hukum yang Jujur.

Jakarta, 10 Juli 2019

## ( Ir. Erya Afrianus )

Widyaiswara Madya